

BAB IV
PENGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN
PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Purworejo

1. Aspek Geografis

Secara geografis, Kabupaten Purworejo masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara $109^{\circ}47'28''$ – $110^{\circ}8'20''$ Bujur Timur $7^{\circ}32'$ – $7^{\circ}32'$ – $7^{\circ}54'$ Lintang Selatan. Luas daerah adalah $1.034,82 \text{ km}^2$ yang terdiri dari $\pm 2/5$ daerah dataran dan $3/5$ daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah :

Tabel 1
Batas Wilayah Kabupaten Purworejo

Sebelah utara	:	Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah timur	:	Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY
Sebelah selatan	:	Samudera Indonesia
Sebelah barat	:	Kabupaten Kebumen

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Secara administratif, Kabupaten Purworejo mencakup 16 Kecamatan yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Kecamatan dengan jarak terjauh dari pusat kota Purworejo adalah Kecamatan Bruno dengan jarak 35 km,

sedangkan kecamatan dengan jarak terdekat adalah Kecamatan Banyuurip dengan jarak dari pusat kota 4 km. Keseluruhan kecamatan dapat dijangkau dengan angkutan darat. Sedangkan jumlah Desa/Kelurahan dan luas Kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Grabag	32	64,92
2.	Ngombol	57	55,27
3.	Purwodadi	40	53,96
4.	Bagelen	17	63,76
5.	Kaligesing	21	74,73
6.	Purworejo	25	52,72
7.	Banyuurip	27	45,08
8.	Bayan	26	43,21
9.	Kutoarjo	27	37,59
10.	Butuh	41	46,08
11.	Pituruh	49	77,42
12.	Kemiri	40	92,05
13.	Bruno	18	108,43
14.	Gebang	25	71,86
15.	Loano	21	53,65

16.	Bener	28	94,08
	Jumlah	494	1.034,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Keadaan geografis daerah Kabupaten Purworejo secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Bagian selatan merupakan daerah dengan dataran rendah, ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan air laut.
- 2). Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25-1050 meter di atas permukaan air laut.¹

Kemiringan lereng atau kelerengan dapat dibedakan adalah :

- 1). Kemiringan 0-2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo.
- 2) Kemiringan 2-15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen.
- 3) Kemiringan 15-40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo.
- 4) Kemiringan >40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.²

¹ (Tanpa Nama), *Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2017*, Purworejo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, hlm 40

² *Ibid.* Hlm 40

Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Suhu udara rata-rata 20⁰C – 32⁰C, sedangkan kelembaban rata-rata antara 70-90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yakni 9.291 mm dan 7.849 mm bulan Januari.

2. Aspek Geologi

Deskripsi mengenai kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Kabupaten Purworejo didominasi oleh litologi batuan berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api, dengan tanah yang terdiri dari batuan mencapai 60,1% dari seluruh wilayah Provinsi tersebut menyisakan area seluas 39,9% yang terdiri dari material jenis aluvium. Adapun agihan secara umum mengenai litologi batuan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut³ :

- 1) Endapan vulkanik tua maupun endapan vulkanik campuran dengan endapan sedimen sebagian besar terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi;
- 2) Endapan alluvium dataran dan sungai, merupakan daerah dengan material endapan muda terbesar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan Kabupaten Purworejo.

³ *Ibid.* Hlm 41

3. Aspek Penduduk

Menurut Angka Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010, Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 berjumlah 712.686 jiwa dengan komposisi 49,32 persen penduduk laki-laki dan 50,68 persen penduduk perempuan.⁴

Tabel 3
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purworejo Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Raiso Jenis Kelamin
1.	Grabag	21.635	22.056	43.691	98
2.	Ngombol	15.679	15.862	31.541	99
3.	Purwodadi	18.524	18.814	37.338	98
4.	Bagelen	14.483	14.937	29.420	97
5.	Kaligesing	14.798	15.031	29.829	98
6.	Purworejo	41.542	43.424	84.966	96
7.	Banyuurip	20.051	20.930	40.981	96
8.	Bayan	22.829	23.945	46.774	95
9.	Kutoarjo	29.585	30.033	59.618	99
10.	Butuh	19.450	20.299	39.749	96
11.	Pituruh	22.998	23.801	46.799	97

⁴ Ibid, hlm 60

12.	Kemiri	25.680	26.185	51.865	98
13.	Bruno	22.063	22.283	44.346	99
14.	Gebang	20.105	20.712	40.817	97
15.	Loano	17.598	17.803	35.401	99
16.	Bener	24.461	25.090	49.551	97
Jumlah		351.481	361.205	712.686	97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.034,82 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 689. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Purworejo sebesar 1.612 per km² dan paling rendah yaitu Kecamatan Kaligesing sebesar 399 per km² . Sedangkan Laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 0,32 persen.

Tabel 4

Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Grabag	64.92	43.691	673
2.	Ngombol	55.27	31.541	571
3.	Purwodadi	53.96	37.338	692
4.	Bagelen	63.76	29.420	461
5.	Kaligesing	74.73	29.829	399
6.	Purworejo	52.72	84.966	1,612

7.	Banyuurip	45.09	40.981	909
8.	Bayan	43.21	46.774	1,082
9.	Kutoarjo	37.59	59.618	1,586
10.	Butuh	46.08	39.749	863
11.	Pituruh	77.42	46.799	604
12.	Kemiri	92.05	51.865	563
13.	Bruno	108.43	44.346	409
14.	Gebang	71.86	40.817	568
15.	Loano	53.65	35.401	660
16.	Bener	94.08	49.551	527
Jumlah		1,034.82	712.686	689

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

B. Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Purworejo

Partai Politik (Parpol) yang bersaing dalam Pemilu tahun 2014 berjumlah 15 (lima belas), antara lain : Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Aceh, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Akan tetapi, Parpol yang terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

berjumlah 12 (dua belas), kecuali Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Aceh karena ketiga parpol tersebut merupakan partai lokal di Provinsi Aceh.

Dari 12 partai politik yang berjuang di pemilu tahun 2014, penulis akan menganalisis 3 partai dalam penelitian ini yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia. PDIP lahir dari pecahan 5 partai antara lain : Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba. PDIP sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri tanggal 10 Januari 1973.

PDI pada masa itu mengalami masalah internal yang berkepanjangan, hingga dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI Periode 1998-2003 secara aklamasi. Namun, setelah Kongres V PDI tersebut selesai, pemerintah tetap mengakui PDI dibawah Kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Sehingga, agar dapat mengikuti pemilu tahun 1999, Megawati Soekarnoputri mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 PAC (Pengurus Anak Cabang Partai) setiap PAC ada 11 orang pengurus, Pengurus Ranting Partai ada 494 (setiap Ranting ada

7 orang pengurus). Dalam struktur kepengurusan inti DPC terdiri dari 19 orang antara lain :

Tabel 5

Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo
Masa Bakti 2015-2020

Ketua	:	Luhur Pambudi
Wakil Ketua Bidang Kehormatan	:	Suti Raharjo
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi	:	Sunarto
Wakil Ketua Bidang Organisasi	:	Tri Tjahyo Widagdo
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	:	Heri Sutoto
Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik	:	Andi Suyono
Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	:	Bambang Winaryo
Wakil Ketua Bidang Maritim	:	Suyadi
Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	:	Sutarno
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	:	Sugiarto
Wakil Ketua Bidang Nelayan, Buruh dan Petani	:	Agung Firdaus
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	:	Indra Kiswanti
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	:	Dion Agasi
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Seni Budaya	:	Wahyudi
Sekretaris	:	Hendrikul Korel
Wakil Sekretaris Bidang Internal	:	Eko Purwanto
Wakil Sekretaris Bidang Program	:	Claudia Dewi Damayanti
Bendahara	:	Prabowo
Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai	:	Pancolo Saputro

Sumber : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan oleh inisiatif dari Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang biasa dipanggil SBY. Pendirian partai demokrat terilhami dari kekalahan terhormat SBY pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001. Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB, partai demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI dan dideklarasikan yang dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 PAC (Pimpinan Anak Cabang) setiap PAC ada 3 pengurus inti dan 494 Pimpinan Ranting. Dalam struktur kepengurusan inti DPC terdiri dari 14 orang antara lain:

Tabel 6
Susunan Nama Jabatan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang
Partai Demokrat Kabupaten Purworejo

Ketua	:	Yophi Prabowo S.H
Wakil Ketua	:	Gus Harjani S.E
Wakil Ketua	:	Bambang Irianto
Wakil Ketua	:	Abdul Muntolib
Sekretaris	:	Pono Gunawan M.Pd
Wakil Sekretaris	:	Purwanto
Wakil Sekretaris	:	Dedik Mujiono S.Pd
Wakil Sekretaris	:	Anggit Bagus Panuntun S.IP

Wakil Sekretaris	:	Dwi Rizky Laela Fitriajeng
Bendahara	:	Abdul Chasib S.Pdi
Wakil Bendahara	:	Yudha Ari Gunawan S.P
Wakil Bendahara	:	Zulaekhah
Wakil Bendahara	:	Sekar Ati Argorini
Wakil Bendahara	:	Khofidoh S.Ag
Wakil Bendahara	:	Silvia Diana

Sumber : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

3. Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional berdiri atas inisiatif sosok Amien Rais, salah satu tokoh penggerak gerakan reformasi tahun 1998. Pasca jatuhnya masa orde baru, Amien Rais dan 49 orang rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) ingin meneruskan perjuangan dan cita-cita besar reformasi dengan cara mendirikan partai politik baru.

MARA bersama PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh besar Muhammadiyah dan Kelompok Tebet menggagas berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Pada awal pembentukan nama partainya ialah Partai Amanat Bangsa (PAB), akan tetapi pada tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, partai tersebut berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) dan dideklarasikan di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1998.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setiap DPC ada 10 pengurus inti dan 494 Pimpinan Ranting setiap Ranting ada 5 pengurus inti. Dalam struktur kepengurusan inti DPD terdiri dari 42 Pengurus antara lain:

Tabel 7
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional
Kabupaten Purworejo Periode 2015-2020

I. Majelis Penasehat Partai Daerah (MPPD)

Ketua	:	H. Chojul Chalim S.H
Wakil Ketua	:	Iksan Haryono
Wakil Ketua	:	Marman Tri Raharjo S.Pd
Wakil Ketua	:	Permani
Wakil Ketua	:	Chabib
Wakil Ketua	:	Ir. H. Irwanto
Anggota	:	Sujarwo, Supali, Suwito

II. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Ketua	:	Drs. H. Zusron. MM
Wakil Ketua	:	Yudha AW
Wakil Ketua	:	Saifudin S.HI., MH
Wakil Ketua	:	Anang Hidayat
Wakil Ketua	:	H. Fahruri
Wakil Ketua	:	Marsono S.E
Wakil Ketua	:	Samini Mulyani S.E
Wakil Ketua	:	Darto
Wakil Ketua	:	Mukharom
Wakil Ketua	:	Supardi S.H
Wakil Ketua	:	Kodim
Wakil Ketua	:	Nugroho Prastomo

Wakil Ketua	:	Moh. Kaelani
Wakil Ketua	:	Kurniyati
Sekretaris	:	Suyitno
Wakil Sekretaris	:	Barjaki
Wakil Sekretaris	:	Supono
Wakil Sekretaris	:	Fenti Yustanti S.Pd
Wakil Sekretaris	:	Agus Maulana
Wakil Sekretaris	:	Eri Kusmayadi S.E
Wakil Sekretaris	:	Nurhayati
Wakil Sekretaris	:	Sarjiman
Wakil Sekretaris	:	Wahyu Dyah
Wakil Sekretaris	:	Muamar Edwin S.E
Wakil Sekretaris	:	Widodo
Wakil Sekretaris	:	Resti Indriyani S.Pd
Wakil Sekretaris	:	Zayin
Wakil Sekretaris	:	Puput Arum Nurjanah S.E
Bendahara	:	Bambang Wijanarko S.H
Wakil Bendahara	:	Kurniawan
Wakil Bendahara	:	Nuryadin
Wakil Bendahara	:	Suyati
Wakil Bendahara	:	Yuniarti Puji Astuti
Wakil Bendahara	:	Nazirabibi
Wakil Bendahara	:	Bowo

Sumber : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Tengah

C. Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Purworejo

Pada Tahun 2014, Kabupaten Purworejo disibukkan dengan pesta demokrasi yaitu proses pemilihan anggota legislatif. Dalam pemilihan anggota DPRD tersebut setiap Parpol beserta calonnya berlomba-lomba merebutkan 45 Kursi yang ada dengan cara memikat hati masyarakat, ada yang aktif berkampanye dalam satu panggung ke panggung lainnya ataupun aktif dalam kegiatan sosial masyarakat sambil mengumbar janji-janji mesranya dan berharap mereka yang akan terpilih. Akan tetapi itu semua merupakan proses dan indahnya berdemokrasi.

Berdasarkan Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo No.259/KPU-KabPwr-012.329449/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Purworejo pada Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Purworejo
Pemilu Tahun 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASDEM	2	29.015
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	39.006
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	26.065
4	PDI PERJUANGAN	8	75.501

5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	71.825
6	PARTAI GERINDRA	6	51.599
7	PARTAI DEMOKRAT	6	44.663
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	19.426
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	18.600
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	25.371
14	PARTAI BULAN BINTANG	0	9.124
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	5.344
JUMLAH		45	415.539

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data tersebut jumlah suara sah dari hasil pemilu DPRD Kabupaten Purworejo berjumlah 415.539 suara. Jumlah tersebut dibagi dengan jumlah kursi yang ada yaitu 45 kursi, berarti setiap 1 kursi mempunyai nilai minimal 9.234 suara. Sesuai dengan perhitungan tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai jumlah suara terbesar yaitu 75.501 suara dan berhak mendapatkan jatah 8 Kursi. Sedangkan Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mendapatkan kursi di DPRD karena jumlah suara yang diperoleh dibawah ambang batas minimal sebesar 9.234 suara.

Adanya strategi politik tersistematis yang dilakukan suatu partai politik dapat dijadikan sebagai peluang partai politik untuk melakukan kebijakan lebih baik daripada sebelumnya dan dapat mengakomodir aspirasi anggota partai politik agar tetap solid dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.⁵

Mesin dan strategi Partai Politik di wilayah Kecamatan ini sangat unik karena di beberapa kecamatan suara suatu parpol sangat stabil sedangkan di kecamatan lain mengalami penurunan drastis. Hal ini sangat berpengaruh karena naik turunnya suara suatu Parpol tergantung siapa calon yang akan dinaikkan dan seberapa besar calon tersebut berpengaruh di wilayah tersebut. Maka dari itu Pendidikan Politik harus terus dipompa agar, suara partisipasi masyarakat naik dan calon pejabatnya pun punya ilmu terkait politik santun. Banyaknya Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 9
Banyaknya Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum menurut Kecamatan
di Kabupaten Purworejo Tahun 2014

No	Kecamatan	DPR	DPD	DPRD I	DPRD II
1.	Grabag	24.692	22.643	24.369	26.310
2.	Ngombol	18.870	16.938	18.335	19.910
3.	Purwodadi	21.295	18.539	20.752	22.793

⁵ Ratnia Solihah, *Pengaruh Dinamika Internal Partai Terhadap Strategi Politik Partai Amanat Nasional Pasca Kongres IV Tahun 2015*, Vol.1/No.2/2016, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjajaran, hlm 118.

4.	Bagelen	16.888	14.906	16.632	17.630
5.	Kaligesing	17.945	15.892	17.740	18.562
6.	Purworejo	42.531	36.815	41.546	44.033
7.	Banyuurip	21.995	19.519	21.392	22.603
8.	Bayan	25.469	22.486	25.290	26.702
9.	Kutoarjo	31.208	27.731	30.932	33.555
10.	Butuh	22.907	20.817	22.465	23.836
11.	Pituruh	26.993	24.446	26.667	28.175
12.	Kemiri	30.805	26.535	29.812	32.898
13.	Bruno	23.044	20.288	22.566	23.932
14.	Gebang	21.641	18.752	20.825	22.858
15.	Loano	19.990	17.049	19.371	21.344
16.	Bener	29.111	24.999	28.138	30.398
Jumlah		395.384	348.355	386.932	415.539

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

D. Kebijakan Penggunaan Dana Partai Politik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik”.

Mengenai besaran jumlah perolehan dana bantuan dari pemerintah daerah kepada parpol juga telah diatur khusus dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berbunyi *“Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya”*.

Dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Panduan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banparpol Pasal 24 ayat (2) yaitu minimal 60% (enam puluh persen) untuk pendidikan politik dari dana yang diterima. Kabupaten Purworejo dalam tahun 2017, bantuan keuangan untuk partai politik yaitu sebesar Rp. 2.574,- (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) per suara sah.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Berdasarkan hasil pemilu DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2014, PDIP memperoleh suara sebanyak 75.501 suara sah, jika suara sah tersebut dikalikan dengan dana bantuan APBD sebesar Rp 2.574,- (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) per suara sah maka, $75.501 \text{ suara sah} \times \text{Rp } 2.574 = \text{Rp } 194.339.574,-$ (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) Tetapi dana yang turun atau diterima PDIP dari

pemerintah daerah digenapkan menjadi Rp 194.339.600,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Tabel 10

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SASARAN
1	PENDIDIKAN POLITIK		145.122.200,00	74,67 %	
	A. Diklat Satgas	1 Kali	40.717.200,00		Kader
	B. Diklat Saksi	1 Kali	37.210.000,00		Kader dan Masyarakat
	C. Diklat Komunitas	5 Kali	67.195.000,00		Kader dan Masyarakat
2	OPERASIONAL SEKRETARIATAN		49.222.215,00	25,33 %	
	A. Administrasi Umum				
	1). Keperluan Kantor		27.113.600,00		
	2). Rapat Internal	12 Kali	2.052.000,00		
	3). Honor Tenaga Admisnistrasi	12 Kali	15.600.000,00		
	B. Langganan Daya dan Jasa				

	1). Listrik	6 Kali	132.615,00		
	2). Surat Kabar	6 Kali	660.000,00		
	C. Pemeliharaan Peralatan Kantor	4 Kali	1.144.000,00		
	D. Pemeliharaan Gedung	1 Kali	2.520.000,00		
3	JUMLAH TOTAL				
	PEMASUKAN		194.339.600		
	PENGELUARAN		194.344.415		
	SALDO		-4.815,00		

Sumber : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo

Sehingga DPC PDIP Kabupaten Purworejo menggunakan dana Banparpol sesuai dengan kriteria proporsi penggunaan dan peruntukan yang ditetapkan, yaitu:

a. Penggunaan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 145.122.200,- (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 74,67%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik telah memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.

b. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.

2. Partai Demokrat

Berdasarkan hasil pemilu DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2014, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 44.663 suara sah, jika suara sah tersebut dikalikan dengan dana bantuan APBD sebesar Rp 2.574,- (dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) per suara sah maka, $44.663 \text{ suara sah} \times \text{Rp } 2.574 = \text{Rp } 114.962.562,-$ (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) Tetapi dana yang turun atau diterima Partai Demokrat dari pemerintah daerah digenapkan menjadi Rp 114.962.600,- (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).

DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 98.403.072,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut tidak sama dengan nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo sebesar Rp 114.962.600,- (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 16.559.528,- (enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) Sisa dana tersebut telah dilakukan pengembalian/penyetoran ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp 16.560.528,- (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 29 Januari 2018.

Tabel 11

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan
 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo
 Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SASARAN
1	PENDIDIKAN POLITIK		54.001.000,00	46,97 %	
	Pendidikan Politik Kader	1 kali	54.001.000,00		Kader
2	OPERASIONAL SEKRETARIATAN		44.401.072,00	38,62 %	
	A. Administrasi Umum				
	1). Pengadaan ATK		689.600,00		
	2). Sewa Kantor	1 Unit	20.000.000,00		
	3). Gaji Tenaga Administrasi Sekretariat	8 Bulan	11.200.000,00		
	B. Langganan Daya dan Jasa				
	1). Bayar Telepon dan Internet Speedy	12 Bulan	5.814.927,00		
	2). Pulsa Listrik	11 Bulan	5.428.000,00		

	3). Bayar Langganan Air PDAM	12 Bulan	1.028.545,00		
	4). Beli Materai Rp. 6000,- (30 buah) dan Rp. 3000,- (20 buah)	50 Lembar	240.000,00		
3	JUMLAH TOTAL				
	PEMASUKAN		114.962.600,00		
	PENGELUARAN		98.402.072,00		
	SALDO		16.560.528,00	14,41%	

Sumber : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo

Namun berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada bantuan keuangan yang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp 281.818,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Hal tersebut diketahui dari sewa gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil pemeriksaan seharusnya harga sewa gedung tersebut hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pajak sebesar Rp. 218.182,- (dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga dapat selisih sebesar Rp 281.818,- (dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Sehingga DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo menggunakan dana Banparpol dengan kriteria proporsi penggunaan dan peruntukan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Penggunaan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp. 53.719.182,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau 46,73%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik tidak memenuhi memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.
- b. Penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.
- c. Tujuan pemberian bantuan keuangan dari APBD kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik belum tercapai secara optimal.

3. Partai Amanat Nasional

Berdasarkan hasil pemilu DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2014, Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 19.426 suara sah, jika suara sah tersebut dikalikan dengan dana bantuan APBD sebesar Rp 2.574 per suara sah maka, $19.426 \text{ suara sah} \times \text{Rp } 2.574 = \text{Rp } 50.002.524,-$ (lima puluh juta dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Tetapi dana yang turun atau diterima Partai Amanat Nasional dari pemerintah daerah digenapkan menjadi Rp 50.002.500,- (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah).

DPD PAN Kabupaten Purworejo telah mempertanggungjawabkan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. 49.913.866,00,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut tidak sama dengan nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPD PAN Kabupaten Purworejo sebesar Rp 50.002.500,- (lima puluh juta dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih terdapat

saldo sebesar Rp 88.634,- (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Tabel 12

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2017

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	SASARAN
1	PENDIDIKAN POLITIK		31.757.200,00	63,51 %	
	A. Rakerda	1	18.957.200,00		Kader
	B. Musycab	1	12.800.000,00		Kader dan Masyarakat
2	OPERASIONAL SEKRETARIATAN		18.156.666,00	36,31%	
	A. Administrasi Umum		16.562.180,00		
	1). Keperluan ATK		1.599.380,00		
	2). Rapat Internal Sekretariat	4	7.312.800,00		
	3). Perjalanan Dinas	2	2.550.000,00		
	4). Honor Tenaga Admisnistrasi	12	5.100.000,00		

	B. Langganan Daya dan Jasa		1.150.386,00		
	1). Listrik dan PDAM	12	1.127.336,00		
	2). Surat Menyurat	1	23.050,00		
	C. Pemeliharaan Data dan Arsip	1	215.700,00		
	D. Pemeliharaan Peralatan Kantor	1	228.400,00		
3	JUMLAH TOTAL				
	PEMASUKAN		50.002.500,00		
	PENGELUARAN		49.913.866,00		
	SALDO		88.634,00	0,18%	

Sumber : Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo

Sehingga DPD PAN Kabupaten Purworejo menggunakan dana Banparpol dengan kriteria proporsi penggunaan dan peruntukan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Penggunaan kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 31.757.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh dua ratus rupiah) atau 63,51%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima.
- b. Penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan penggunaan dana Banparpol.

E. Pelaksanaan dan Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik

Dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 10 yaitu kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut partai politik merancang berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan politik karena hal tersebut merupakan kewajiban dari partai politik itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan politik sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

a. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Penulis melakukan wawancara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dengan Bapak Ir. Luhur Pambudi Mulyono.,MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo.

Menurut beliau, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDIP mulai dari tahun 2016 lebih baik lagi, intinya direncanakan satu tahun sebelumnya dalam rapat partai untuk direncanakan tahun berikutnya untuk pendidikan

politik. Baik bersumber dari hasil gotong royong, sumbangan yang sah dan dari APBD, contohnya di tahun 2017, sudah berjalan pendidikan politik dalam bentuk pelatihan saksi untuk badan saksi PDIP. Dilatih bagaimana menjadi saksi yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan berkualitas baik untuk kepentingan partai maupun demokrasi. Di dalam pelatihan juga disisipkan pendidikan politik tentang pilar-pilar bernegara yaitu bagaimana menjadi pancasila yang baik. Pada Badan Pemenangan Pemilu juga diadakan pelatihan untuk semua pengurus PAC agar bisa menjadi roh Bung Karno, menjadi mandiri, berdikari, berdaulat dan menjadi seseorang yang punya kepribadian yang baik. PDIP juga selalu menjunjung tinggi 4 pilar bernegara. Lalu yang berperan penting untuk melaksanakan pendidikan politik yaitu kader partai itu sendiri ”.⁶

Intinya pada tahun 2017 ini, DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah menggunakan Bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik sebesar 74,67%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik telah memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima. Sebagaimana program yang telah terlaksana antara lain :

- 1). Diklat Satgas
- 2). Diklat Saksi
- 3). Diklat Komunitas Juang I, II, III, IV dan V

⁶ Wawancara dengan Bapak Ir. Luhur Pambudi Mulyono., MM selaku Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo, tanggal 09 Juli 2018.

b. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Dalam setiap program yang dikerjakan pasti ada kendala yang terjadi, baik yang sudah diketahui sebelumnya ataupun yang tidak. Kendala yang dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan program pendidikan politik menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Purworejo, Bapak Ir. Luhur Pambudi Mulyono., MM. PDIP merasa jumlah dana bantuan dari pemerintah kurang, bantuan untuk parpol hanya sebagian kecil dari apa yang telah dilaksanakan PDIP, maka dari itu tidak akan disalahgunakan oleh PDIP.

Menurut beliau, jumlah anggaran sama semenjak 7 tahun yang lalu. Intinya kendala utama yang dirasakan PDIP yaitu pembiayaan karena pembiayaan itu bukan hanya uang saku tetapi sewa gedung, biaya makanan dan minuman.

Beliau juga menjelaskan jika PDIP mempunyai anak ranting 3.000 dikali 3 orang setiap RW maka 9.000 orang dan pengurus desanya, 494 desa dikali 7 orang jadi 3.458 orang itu sudah ada 12.458 orang. Lalu dikalikan untuk biaya snack dan minum sudah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) coba dihitung 12.458 orang dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah habis biaya Rp. 90.003,458,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus lima puluh delapan) Itu hanya acara yang lamanya 2 jam. Kalau bukan dari gotong Royong dari setiap kader partai mungkin, tidak akan jalan programnya”.⁷

⁷ *ibid.*

2. Partai Demokrat

a. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Penulis melakukan wawancara di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Purworejo dengan Bapak Yophi Prabowo S.H, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo.

Menurut beliau, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada saat Raker (Rapat Kerja) yang dinamakan Pendidikan Politik Kader. Dalam pendidikan politik selalu mengedepankan politik yang santun, cerdas dan jujur sesuai dengan instruksi pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) agar partai dan pengurusnya tidak arogansi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka tertarik pada Partai Demokrat.

Menurut beliau, Narasumber dalam pendidikan politik Partai Demokrat yaitu dari kalangan akademisi, KPU, Panwas, dan Pimpinan Partai terkait regulasi dari aturan Pemilu”.⁸

Intinya pada tahun 2017 ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo telah menggunakan Bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik sebesar 46,73%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik tidak memenuhi memenuhi proporsi paling sedikit

⁸ Wawancara dengan Bapak Yophi Prabowo S.H selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, tanggal 06 Juli 2018.

sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima. Sebagaimana program yang telah terlaksana yaitu Pendidikan Politik Kader.

b. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Dalam setiap program yang dikerjakan pasti ada kendala yang terjadi, baik yang sudah diketahui sebelumnya ataupun yang tidak. Kendala yang dialami Partai Demokrat dalam pelaksanaan program pendidikan politik menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, Bapak Yophi Prabowo S.H, bahwa Partai Demokrat merasa dana bantuan yang diberikan pemerintah masih sangat kurang, karena untuk biaya uang saku saja, setiap kali pertemuan diberikan uang saku Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per anggota, jadi untuk transportasi, makan dan minum, biaya sewa tempat, sewa kursi, sewa *sound system*, pemasangan atribut partai sudah habis.

Menurut beliau, Partai Demokrat berharap ada kenaikan dana bantuan dari pemerintah agar dapat mencukupi kebutuhan partai karena Partai Demokrat tidak hanya sekali pertemuan tetapi minimal enam kali pertemuan. Sehingga, pemasukan dari iuran anggota fraksi dan pengurus partai sangat diperlukan.⁹

3. Partai Amanat Nasional

a. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Penulis melakukan wawancara di Kediaman Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo dengan Bapak

⁹ *ibid.*

Drs. Zusron., MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo.

Menurut beliau, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PAN pada tahun 2017, pada saat Rakerda (Rapat Kerja Daerah), didalamnya terdapat penguatan atau reorganisasi tingkat kecamatan, serta ada musycab yang kepengurusannya berganti, itu juga merupakan pendidikan politik.

Menurut beliau, Ada juga program yang mengajak tiap-tiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk bertemu dengan ketua partai tingkat pusat, juga mengundang beberapa tokoh tingkat wilayah dan pusat serta akademisi untuk memberikan pencerahan, dalam bentuk sarasehan atau seminar.¹⁰

Intinya pada tahun 2017 ini, DPD PAN Kabupaten Purworejo telah menggunakan Bantuan Partai Politik dari APBD Kabupaten Purworejo untuk pendidikan politik sebesar 63,51%, sehingga jumlah penggunaan dana untuk pendidikan politik memenuhi proporsi paling sedikit sebesar 60% dari jumlah bantuan keuangan yang diterima. Sebagaimana program yang telah terlaksana antara lain :

- 1). Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
- 2). Musyawarah Cabang (Musycab)

b. Kendala Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Dalam setiap program yang dikerjakan pasti ada kendala yang terjadi, baik yang sudah diketahui sebelumnya ataupun yang tidak. Kendala yang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Zusron., MM selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo, tanggal 09 Juli 2018.

dialami Partai Amanat Nasional dalam pelaksanaan program pendidikan politik menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo, Bapak Drs. Zusron., MM bahwa Partai Amanat Nasional merasa dana bantuan dari pemerintah masih kurang. PAN mendapatkan dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kalau semisal dalam setahun dibagi 60% akan sangat sulit membaginya. Kalau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pendidikan politik, buat pengurus cabang saja sudah habis. Semisal untuk mengadakan musyawarah itu butuh makan, snak dan kalau sudah selesai dipakai untuk mengganti biaya perjalanannya dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, jadi itu semua sudah habis dananya. Itu karena kursi yang ada hanya 1 (satu) anggota dewan, untuk membiayai satu kabupaten sangat kurang sekali. Kalau 1 (satu) anggota dewan 1 (satu) Dapil itu masih bisa mencukupi.”¹¹

¹¹ *Ibid.*